



HULONDALO

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI

Available online <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/index>

Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

The Role of Village Government in Empowering Communities in Ollot I Village, Bolangitan Barat District, Bolaang Mongondow Utara District

Moh Syafir Van Gobel^{1*}, Marten Nusi², Deliana Vitasari Djakaria³

¹²³Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

Email: amargobel05@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta memastikan indikator-indikator pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini ialah merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini ialah Kepala Desa Ollot I, aparatur desa dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa ollot I yaitu dengan adanya Peranan pemerintahan desa dalam pelaksanaan kebijakan dari warga dalam pembangunan Peningkatan ekonomi, SDM, meningkatkan metode pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peranan pemerintahan desa sebagai eksekutor kebijakan. Peranan pemerintahan desa sebagai Pembina (2) indikator pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, mengembangkan kegiatan keagamaan, pengembangan kegiatan pemuda pemudi, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Kata Kunci : Peranan; Pemerintah Desa;Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

This study aims to describe the role of the village head in empowering the people of Ollot I village, West Bolagitang sub-district, Bolaang Mongondow Utara district and to ascertain the supporting and inhibiting indicators that influence the role of the village head in empowering the Ollot I village community, Bolagitang Barat sub-district, Bolaang Mongondow Utara district. This research is a descriptive research with a qualitative approach. the subjects of this study were the village head of Ollot I, village apparatus and the community. data collection methods used by researchers are interviews, observation, and documentation. Data analysis is done by displaying data, reducing data, and drawing conclusions. The results of the study show that: (1) the role of the village head in empowering the community in Ollot I village, namely the role of the village government in implementing policies from residents in developing the economy, human resources, increasing the goals of administering village governance. The role of village government as policy executor. The role of village government as a coach (2) indicator Village community empowerment is one of the efforts to improve community welfare, through several activities including increasing the development of village economic enterprises, developing village financial institutions, developing religious activities, developing youth activities, as well as other activities activities that can increase the ability of the community to increase production. Therefore, in building rural communities, especially in the socio-economic field of society, a leader is needed, in this case the Village Head who is expected to function as a source of innovation, coach, direct and function as a communicator to convey ideas or ideas to the village community, in achieving better standard of living.

Keywords : Role; Village Head; Community Empowerment

I. PENDAHULUAN

Perubahan sistem dari sentralistik ke desentralisasi sejukurnya membawa angin segar bagi daerah masing-masing, karena diharapkan akan lahir percepatan pembangunan di daerah yang progresif dengan mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah masing-masing. Hal juga dipandang sebagai dampak positif lahirnya desentralisasi (Ali et al., 2018; Widodo, 2001) adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Mulai dari tahapan perencanaan, sampai pada pelaksanaan masyarakat dilihat secara langsung guna memenuhi kebutuhan bersama. Maka oleh karena itu sangat dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola atau mengatur dengan baik seluruh tatanan sistem yang ada dalam konsep desentralisasi sebagai modal dasar dalam penciptaan sumber-sumber ekonomi guna pembiayaan pembangunan.

Pembangunan dalam konteks otonomi daerah lebih mengarahkan pada konsensus bersama antara pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan pembangunan (Dumbi et al., 2022; Podungge et al., 2023). Seluruh konsep pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep pemberdayaan dalam konteks kedaerahan lebih cenderung pada arah pembangunan yang

berbasis pada masyarakat Desa. Konsep pembangunan masyarakat Desa banyak diarahkan pada proses pemberdayaan masyarakat seutuhnya dengan pelibatan diri masyarakat pada seluruh proses pembangunan yang dicanangkan.

Lemahnya intervensi pemerintah baik pemerintah Desa, maupun pemerintah Desa dalam hal memainkan perannya guna mewujudkan proses pemberdayaan telah menjadi persoalan klasik dan mendasar pada proses pembangunan masyarakat. Kurangnya peran yang maksimal dari pemerintah menjadikan sasaran pembangunan manusia menjadi terhambat dan dilain sisi berimplikasi pada tidak adanya peningkatan hidup dari masyarakat tersebut.

Kegagalan program pembangunan pedesaan di masa lalu, lebih banyak disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, sehingga terkesan bahwa semua program pembangunan yang dilaksanakan hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan saja.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Pola pemberdayaan masyarakat secara konsep diarahkan pada pelibatan masyarakat sepenuhnya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan di Desa dan itulah yang menjadi tujuan dasar lahirnya otonomi daerah. Untuk itu, masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan dalam menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah desa dan lembaga lainnya mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Hasil penelitian awal penulis pada pemerintah Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa arah pembangunan manusia melalui program pemberdayaan belum sepenuhnya di maksimalkan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat kebijakan pembangunan yang dicanangkan masih seputar masalah infrastruktur dan kegiatan fisik lainnya, dilain sisi dapat lihat bahwa tingkat kemiskinan masyarakat yang Desa Ollot I juga masih memprihatinkan, usaha-usaha ekonomi mikro belum sepenuhnya tumbuh, kurangnya kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan diri dibidang ekonomi, serta program-program pemberdayaan lainnya yang masih perlu diarahkan pada proses pemberdayaan. Sehingga permasalahannya adalah

bagaimanakah peranan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di era otonomi daerah.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah peranan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penelitian ini menjadikan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai pendekatannya. Metode deskriptif yaitu suatu metodologi untuk penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu pemikiran pada masa sekarang. Penelitian dengan sifat kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara baik karakter suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala pada masyarakat (Riduwan, 2018; Sugiyono, 2013, 2014, 2016, 2018a, 2018b).

Fokus penelitian terkait dengan peranan pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari : Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, peran pemerintan desa sebagai pelaksana program-program serta peran pemerintah desa sebagai Pembina.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2018a, 2018b).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

a) Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dengan fokus pembangunan seutuhnya diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui dimensi kebijakan pembangunan. Salah satu konsep pembangunan yang saat ini

menjadi fokus pembangunan manusia adalah melalui program pemberdayaan. Pemberdayaan telah menjadi pilihan kebijakan yang kongkrit bagi pemerintah, karena memiliki dampak yang langsung pada kehidupan masyarakat.

Kepala Desa adalah agen perubah di wilayah pedesaan dengan segala kewenangannya mampu merencanakan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan secara maksimal dan berkesinambungan.

Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga peranan, yaitu peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, peran pemerintah desa sebagai pelaksana program-program, dan peran pemerintah desa sebagai pembina.

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan.

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pemerintahan Desa, unsur-unsur yang terlibat sebagai mitra kelembagaan Desa bersama-sama untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan yang mengarah pada perbaikan hidup masyarakat.

Dari program pemberdayaan masyarakat yang berhasil dirumuskan dalam musrenbang Desa Ollot I, Kepala Desa dapat dikatakan dapat bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ollot I (21 September 2022) dimana dikatakan bahwa:

“Dalam hal menjalankan pemerintahan, kehadiran pemerintah desa dalam setiap momen bersama masyarakat akan sangat membantu dan memotivasi masyarakat untuk hadir dan turut serta membangun desa. Peran dalam kontes ini menurut saya adalah hal terpenting yang kami dari pemerintah desa kembangkan dan komitmen akan hal tersebut”

Dari informasi yang dikatakan oleh informan di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan perannya selaku pelaksana kebijakan, Kepala Desa Ollot I dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena dapat menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang) sebagai sarana pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa, di mana hasil keputusan yang diambil dalam kegiatan tersebut adalah merupakan program kegiatan yang diperuntukkan kepada program pembangunan desa ke depan.

Hal ini juga dipertegas oleh ketua BPD (September 2022) yang mengatakan:

“Iya, dapat dilihat dari musrenbangda baru-baru ini, dimana kami mengorganisir siapa yang harus hadir dalam kegiatan tersebut agar semua kebutuhan masyarakat bisa disampaikan dalam kegiatan itu”.

Keberadaan pemerintahan desa adalah unsur yang paling dekat dengan masyarakat dimana pemerintah desa selaku pembina, pengayom,

dan pelayanan masyarakat memiliki peran dalam mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan desa. Untuk itu, Kepala Desa harus melibatkan semua pihak dalam kegiatan musrenbang agar program yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut mendapat dukungan yang dari masyarakat.

Di samping itu, Kepala Desa Ollot I juga dapat melakukan kerja sama dengan baik pada tokoh masyarakat yang tentunya mempunyai akses yang cukup tinggi pada masyarakat di dusunnya masing-masing. Sebagaimana dikatakan oleh (Kaur pembangunan, 22 September 2022) yang mengatakan bahwa:

“Iya, tapi tentunya dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat karena dari mereka didapat informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat”.

Tentunya kita memahami bahwa program pemberdayaan masyarakat diperlukan agar setiap kegiatan pembangunan di desa mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran seorang figur yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan salah komponen penting dalam kepemimpinan di desa, karena pemikiran dan perkataan mereka sering didengar oleh masyarakat di sekitarnya. Respon yang agat berbeda disampaikan seorang informan dari masyarakat, (23 September 2022) yang mengatakan bahwa:

“ya tetapi kurang koordinasi yang baik, seperti dalam dalam menyusun kebijakan melalui musyawarah desa, banyak tokoh masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, akibatnya banyak kebutuhan masyarakat tidak disampaikan dalam musyawarah tersebut”.

Proses pemberdayaan masyarakat seharusnya dilakukan secara kolektif (bersama), antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Untuk itulah Kepala Desa telah mengambil beberapa kebijakan yang dianggap sebagai upaya yang maksimal dalam program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Ollot I (23 September 2022), yang mengatakan kebijakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah:

“Melibatkan secara maksimal dalam hal pembangunan di desa dalam bentuk kepanitiaan maupun partisipasi langsung dalam bentuk tenaga maupun dana. Untuk itu program pembangunan yang dirancang seperti, mengaktifkan semua kelembagaan masyarakat yang ada di desa Ollot I, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Senada dengan yang diungkapkan oleh informan di atas, informan lain yang juga merupakan Ketua BPD (26 September 2022) mengatakan hal yang hampir sama, yakni:

“Melibatkan secara maksimal dalam hal pembangunan di desa dalam bentuk kepanitiaan maupun partisipasi langsung dalam bentuk tenaga maupun dana,

karena tugas lembaga pemberdayaan masyarakat memastikan masyarakat ikut dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Kebijakan lain tentang pemberdayaan masyarakat berasal dari pemerintah desa, kami hanya mendukungnya saja”.

Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu, tetapi juga berbagai institusi. Olehnya pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan potensi dari masyarakat melalui metode dorongan yang kuat untuk membangkitkan kesadaran sehingga mereka dapat menyadari potensi masing-masing. Salah satunya dalam bentuk kegiatan gotong royong, seperti yang dikatakan oleh (Kaur pembangunan, 27 September 2022) bahwa kebijakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan:

“gotong royong, kerja bakti. Ini kegiatan pemberdayaan yang pemerintah desa lakukan, karena di desa ini ada kegiatan pembangunan fisik yang didanai oleh pemerintah kabupaten”.

Atau kegiatan lain seperti yang dikatakan oleh (Kaur Umum, 24 September 2022):

“kebijakan pembagian raskin, menggalakkan kegiatan gotong royong masyarakat dan kegiatan pembinaan pemuda desa”.

Dapat juga dilakukan dengan kegiatan dialog, sebagaimana dikatakan oleh (masyarakat, 26 September 2022):

“biasanya hanya berupa himbauan untuk menyukseskan kegiatan pembangunan, itupun yang sampaikan hanya tokoh masyarakat dan sebagian warga masyarakat yang menyampaikan dari mulut ke mulut mengenai himbauan kepala desa”.

Dengan demikian banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, baik melalui penanaman nilai kesadaran dan kecintaan pada desanya, serta dalam wujud kegiatan fisik berupa kegiatan gotong royong dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

2) Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program-program

Lembaga pemerintahan Desa Ollot I pada awal pembuatan program pemberdayaan masyarakat, selalu mengawalinya dengan perencanaan dari tingkat Dusun dngan melibatkan warga masyarakat setempat. Kemudian melanjutkan pada musyawarah diatasnya yaitu musyawarah desa dengan melibatkan seluruh komponen desa, khususnya masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan mengenai sebelum membuat program pemberdayaan, telah diawali dengan meminta masukan (musyawarah) di tingkat dusun, Kepala Desa Ollot I (27 September 2022) mengatakan:

“ya. Tentu saja, karena dalam musrenbang tingkat desa yang diminta semua persoalan atau kebutuhan masyarakat perdusun untuk disampaikan ke pemerintah desa. Dari masukan dusun tersebut nantinya akan dipilih mana

program yang harus didahulukan karena sangat mendesak untuk diselesaikan. Pemilihan program ini dilakukan karena anggaran yang dimiliki desa sangat terbatas, jadi kita pilih yang paling prioritas dulu”.

Informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa di atas, juga dikatakan oleh Ketua BPD (28 September 2022) bahwa:

“ya karena disana sumber masalah dalam pembangunan dan dusun juga merupakan lokasi pembangunan fisik. Dengan demikian sebelum musrenbang, kami minta setiap kepala dusun atau tokoh masyarakat untuk berdialog dengan masyarakatnya apa yang akan dibangun atau diperbaiki”.

Kemudian informasi di atas diperkuat oleh (Kaur Umum, 29 September 2022) dengan mengatakan bahwa:

“Ya, sebelum melaksanakan kegiatan musyawarah desa, Kepala Desa meminta kepala dusun untuk mengkoordinir kegiatan di dusunnya masing-masing dengan meminta masukan dari warganya mengenai apa yang mereka akan bangun di dusunnya masing-masing, agar dalam pelaksanaannya nantinya mendapat dukungan dari masyarakat tersebut”.

Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah desa Ollot I telah melaksanakan konsep pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan dari bawah. Untuk itu, Kepala Desa hendaknya memastikan bahwa dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa, semua pihak harus dimintai gagasan awalnya agar semua kebutuhan masyarakat dapat ditampung, sebagai acuan dalam membuat program pemberdayaan masyarakat desa. Kalau ada masyarakat yang merasa tidak dilibatkan, maka mereka akan bersikap tidak peduli pada program pemberdayaan yang dirumuskan pemerintah desa bersama lembaga pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan yang lain mengatakan bahwa masih ada masyarakat tidak dilibatkan dalam merumuskan rencana program pemberdayaan di tingkat dusun, sebagai dikatakan oleh (masyarakat, 25 September 2022) yang mengatakan bahwa:

“saya kurang tau, karena saya tidak pernah diundang kalau ada musyawarah di tingkat dusun, mungkin hanya ketua RT atau ketua RW dan tokoh masyarakat saja yang diundang”.

Hal yang sama dikatakan oleh (masyarakat), 25 September 2022

“Saya kurang tau, mungkin ada. Yang jelas saya tidak pernah mendapat undangan untuk kegiatan itu, bahkan mendengar saja ada rapat untuk membuat rencana kegiatan pembangunan di dusun kami, saya tidak pernah mendengarnya”.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat banyak disebabkan karena program tersebut merupakan gagasan dari masyarakat desa itu sendiri, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mendapat respon dan dukungan yang besar dari masyarakat. Olehnya itu, pemerintah desa sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa sebagai wadah untuk

menggali gagasan dari masyarakat, harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengungkapkan semua permasalahan atau apa yang dibutuhkannya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hasil wawancara dengan informan mengenai pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memberi gagasan untuk program pemberdayaan dalam musyawarah pembangunan desa, pada umumnya mengatakan bahwa masyarakat sudah diberi kesempatan yang luas untuk mengemukakan gagasannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Ollot I (27 September 2022) yang mengatakan:

“ya masyarakat dilibatkan dalam memberikan gagasan yang bersifat membangun. Paling banyak melalui perwakilan oleh kepala dusunnya atau tokoh masyarakat yang ditunjuk, atau bisa juga masyarakat datang langsung ke musrenbang untuk menyampaikan keluhannya, juga tidak dilarang”.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Ketua BPD (28 September 2022):

“ya masyarakat dilibatkan dalam memberikan gagasan yang bersifat membangun, tetapi tidak semua karena hanya sebagian kecil saja masyarakat yang suka menyampaikan unek-uneknya, yang lain hanya mewakilkan kepada kepala dusun atau tokoh masyarakat mereka”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh (Kaur pembangunan, 23 September 2022) yang mengatakan:

“ya semua diberi kesempatan yang untuk menyampaikan gagasannya, tetapi masyarakat lebih cenderung mempercayakannya kepada kepala dusun atau tokoh masyarakat mereka di dusun”.

Olehnya itu pembangunan desa dalam setiap prosesnya baik dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan tindak lanjutnya, harus diorientasikan pada pengikutsertaan masyarakat, begitupun pada organisasi yang ada pembangunan desa harus mengedepankan aspek prosedural dana pendekatannya serta selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi hadirnya partisipasi masyarakat secara maksimal. Partisipasi masyarakat desa dalam hal ini yaitu termasuk didalamnya upaya memperoleh gagasan-gagasan baru atau inovasi wujud dari kebiasaan masyarakat ikut serta pada proses pengambilan kebijakan pembangunan desa.

Walaupun memang harus diakui bahwa semua gagasan yang diungkapkan oleh masyarakat tidak harus diwujudkan, namun setidaknya ada penjelasan dari pemerintah desa atau lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menjelaskan mengapa gagasan mereka belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat karena ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga harus diberlakukan skala prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah timbulnya respon negatif dari masyarakat mengenai itikad dari pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan yang merupakan warga masyarakat, (masyarakat, 2 Oktober 2022) mengatakan:

“ya masyarakat dilibatkan dalam memberikan gagasan yang bersifat membangun, hanya masukan yang diberikan jarang dilaksanakan oleh pemerintah desa ataupun lembaga pemberdayaan masyarakat”.

Untuk itu, Kepala Desa harus meningkatkan koordinasi antar warga secara rutin supaya terjalin suatu hubungan yang erat antara pimpinan dengan bawahan, tentunya melalui tokoh masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman atas penyampaian gagasan warga yang belum bisa diwujudkan. Dalam hal ini, peran Kepala Desa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat begitu menentukan terlaksananya setiap program pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya. Olehnya kemampuan ini harus bisa dilaksanakan dan dilaknakan oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

3) Peran Pemerintah Desa sebagai Pembina

Kepala Desa mempunyai posisi atau kekuasaan yang besar dalam memberikan perannya untuk pemberdayaan masyarakat. Olehnya itu, siapapun yang dipercayakan sebagai pembuat kebijakan pemberdayaan masyarakat, akan berperan sebagai perantara antara apa yang sudah ada di masyarakat dengan apa yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan. Posisi Kepala Desa sebagai perantara harus bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik, dan harus bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan atau konflik yang ada dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai kemampuan pemerintah desa melakukan fungsi pembinaan dalam program pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa Ollot I (2 Oktober 2022) mengatakan:

“ya, tentunya dengan dibantu oleh para kepala dusun dan tokoh masyarakat karena biasanya masyarakat lebih dekat dengan mereka. Pemerintah desa juga sering menyampaikan pada saat ada kegiatan desa dimana Kepala Desa diminta untuk berbicara, saya selalu mengingatkan terus mengenai pentingnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena tanpa itu semuanya pasti akan bermasalah”.

Demikian juga yang dikatakan oleh Ketua BPD (5 Oktober 2022):

“ya bisa, tetapi tentunya dengan dukungan semua pihak karena tidak mungkin Kepala Desa melakukannya seorang diri, apalagi warga masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor desa, sangat jarang datang ke kantor desa”.

Dari informasi yang diberikan oleh dua informan di atas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa dapat melakukan pembinaan dalam program

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan. Kepala Desa juga berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat untuk menyampaikan hal yang kepada masyarakat karena persoalan lokasi dusun yang jauh dari pusat desa.

Namun informasi yang agar berbeda disampaikan oleh beberapa informan bahwa Kepala Desa belum begitu maksimal dalam melaksanakan perannya selaku pembina dalam program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Elvia Ismail (Kaur pembangunan, 5 Oktober 2022) yang mengatakan:

“ya, walaupun mungkin belum maksimal. Selama ini pemerintah desa berusaha melakukan pembinaan lewat kegiatan sosialisasi untuk menanamkan rasa kecintaan masyarakat pada desanya”.

Demikian pula yang dikatakan oleh informan berikut, (masyarakat, 3 Oktober 2022) bahwa:

“saya kira masih kurang, karena kesadaran pada semua warga masyarakat tidak terjadi, maksudnya masyarakat hanya mau kerja bakti kalau kegiatan itu berlangsung di dusunnya”.

Dan pernyataan yang sama dikemukakan oleh (masyarakat, 3 Oktober 2022)

“tidak dapat, karena semangat gotong royong masyarakat tidak berkelanjutan atau tidak menimbulkan kesadaran pada masyarakat bahwa itu merupakan tanggungjawab mereka. Masyarakat hanya mau bekerja gotong royong kalau kegiatan pembangunan desa itu dilaksanakan di dusunnya saja, kalau di dusun lain, mereka tidak mau”.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa belum begitu maksimal dalam melaksanakan perannya selaku pembina dalam program pemberdayaan masyarakat, karena keterlibatan masyarakat tidak maksimal dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat karena semangat gotong royong masyarakat tidak berkelanjutan atau tidak menimbulkan kesadaran pada masyarakat bahwa itu merupakan tanggungjawab mereka.

Salah satu sasaran pokok pemberdayaan masyarakat desa ialah memberantas atau setidaknya-tidaknya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Oleh karena itu, pembangunan desa harus melibatkan sebagian besar masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas utama Kepala Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa untuk berupaya semaksimal mungkin untuk memberdayakan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hasil wawancara dengan Ketua BPD (6 Oktober 2022) mengatakan bahwa:

“ya, setiap program pembangunan desa yang dilaksanakan banyak masyarakat yang turut ambil bagian dalam bentuk gotong-royong atau kerja bakti bersama.”.

Maksud dari pernyataan yang dikemukakan oleh informan di atas bahwa salah satu bukti pemerintah desa dapat memperdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari tingkat keikutsertaan masyarakat ketika sebuah program dilaksanakan. Hal ini terjadi karena sebagian besar program pemberdayaan masyarakat merupakan saran dan gagasan masyarakat ketika dilaksanakan musyawarah pembangunan desa, sebagai dikatakan oleh salah seorang informan (Kaur Umum, 6 Oktober 2022) bahwa:

“ya, karena pada umumnya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, semuanya adalah saran dari masyarakat melalui kepala dusunnya atau tokoh masyarakat yang ditunjuk”.

Kedudukan yang strategis yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pembangunan desa. Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di desa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itu, Kepala Desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkordinasi dengan semua komponen terkait di desa dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program tersebut, agar masyarakat dapat diberdayakan dalam pelaksanaan program yang dimaksud. Hasil wawancara dengan informan menyangkut pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dapat memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, (masyarakat, 5 Oktober 2022) mengatakan:

“ya, tetapi kurang maksimal karena hanya masyarakat yang dekat lokasi kegiatan saja yang terlibat di dalamnya, kalau masyarakat dari dusun lain jarang yang ikut terlibat, karena berpikir lebih melakukan pekerjaan lain”.

Senada dengan informan di atas, (masyarakat, 5 Oktober 2022) juga mengatakan:

“kurang dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan karena banyak warga yang tidak ikut gotong royong apabila ada kegiatan pembangunan fisik dibandingkan dengan yang ikut. Mereka lebih baik bekerja untuk mencari pendapatan karena pelaksanaan kegiatannya bukan hari libur”.

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh informan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa kurang dapat memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga kurang maksimal dalam menanamkan rasa kesadaran dalam diri masyarakat mengenai posisi mereka dalam setiap program pemerintah desa. Akibatnya adalah tidak semua warga masyarakat ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan karena kegiatan tersebut tidak

dilakukan di dusunnya, padahal kegiatan tersebut tetap dilakukan di dusun yang merupakan wilayah Desa Ollot I, sehingga tidak ada alasan untuk tidak ikut serta.

b) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade utilitas* dari obyek yang diberdayakan. Karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian sehari-hari, pemberdayaan masyarakat selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan masyarakat kelas bawah yang umumnya dinilai tidak berdaya. Hal ini dilakukan agar masyarakat tersebut memiliki rasa percaya diri masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara mengenai pemerintah desa dapat membangun rasa percaya diri masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, jawaban yang diberikan informan cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Ollot I (, 2 Oktober 2022) yang mengatakan:

“ya, itulah tujuan pembinaan yang kami lakukan agar masyarakat sadar dan memiliki rasa percaya diri yang kuat tentang potensi yang mereka miliki, dan tanpa keikutsertaan mereka maka tujuan program pemberdayaan tidak akan tercapai”.

Demikian juga yang dikatakan oleh mitra kepala desa, Ketua BPD (Oktober 2022) bahwa:

“ya, karena setiap kegiatan pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat menimbulkan kepercayaan diri pada masyarakat bahwa mereka mampu menyelesaikan kegiatan tersebut”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah dapat memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa berhasil tidaknya semua program pembangunan di desa mereka sangat tergantung kepada keikutsertaan dan kontribusi mereka dalam pelaksanaan program tersebut. Kemajuan desa mereka berada ditangan mereka sendiri, bukan orang lain, sehingga mereka tidak perlu bergantung kepada orang lain.

Namun tanggapan yang berbeda datang dari informan warga masyarakat, yang melihat program pemberdayaan masyarakat belum mampu membangun rasa percaya diri masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh (masyarakat, Oktober 2022) bahwa:

“kurang dapat membangun rasa percaya diri karena tidak semua ikut dalam kegiatan pembangunan, karena kurang yakin kalau itu untuk kepentingan mereka”.

Keterangan informan di atas diperkuat oleh (masyarakat, Oktober 2022) yang mengatakan bahwa:

“kurang dapat karena walaupun mereka ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat itu maka tidak memberikan perubahan yang berarti pada diri mereka. Masyarakat maunya kegiatan pemberdayaan itu berupa pelatihan keterampilan kerja supaya mereka dapat gunakan untuk membuka usaha mandiri, misalnya pelatihan keterampilan bidang perbengkelan, jahit menjahit, koperasi dan lain-lain”.

Dari pernyataan yang diberikan oleh informan di atas dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan kurang mampu membuat masyarakat memiliki kepercayaan diri karena program pemberdayaan yang dilakukan kurang dapat memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan ekonomi mereka. Yang mereka inginkan adalah program pemberdayaan yang dapat memberikan keterampilan khusus agar bisa digunakan untuk membuka usaha sendiri.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ollot I (Oktober 2022) memang menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih lebih cenderung pada pembentukan sikap untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan, belum mengarah pada kegiatan untuk memberikan bekal keahlian kepada masyarakat, sebagaimana dikatakan sebagai berikut:

“pembinaan seperti kunjungan ke dasa wisma, dan ke masjid-masjid atau apabila ada kegiatan-kegiatan hajatan masyarakat. Di samping itu, pemerintah desa Ollot I juga melakukan kegiatan pembinaan karang taruna atau kepemudaan, pembinaan dalam bidang keagamaan bekerja sama dengan para tokoh agama, dan pembinaan dalam bidang keamanan untuk menjaga desa”.

Pernyataan ini juga dipertegas oleh ketua BPD (Oktober 2022) bahwa: *“Kepala Desa dengan lembaga pemberdayaan masyarakat lebih banyak melakukan pembinaan pada generasi muda di daerah ini agar bisa produktif sehingga tidak terlibat dalam perbuatan negatif. Juga pembinaan dalam bidang keagamaan dan keamanan desa”.*

Masyarakat memiliki wewenang dan hak untuk menentukan usaha apa yang akan dikembangkan, karena masyarakat lokal lebih mengetahui kondisi dan potensi daerah mereka. Pemerintah sebagai fasilitator berkewajiban untuk memberikan dukungan, pengetahuan, pengajaran, dan penyuluhan kepada masyarakat demi kesuksesan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus selalu memberikan pendampingan kepada masyarakat agar sumber daya alam dan sumber daya manusianya dapat dikembangkan dengan maksimal.

Tanggapan dan harapan disampaikan oleh warga masyarakat selaku informan, (masyarakat, Oktober 2022) mengatakan bahwa:

“paling banyak hanya pada generasi muda saja, dan itupun hanya pembinaan menyangkut tanggungjawab mereka terhadap pembangunan desa, padahal

lebih baik lagi kalau ada program pembinaan yang mengarah pada peningkatan keterampilan khusus, misalnya kursus agar pemuda tersebut memiliki keterampilan untuk menghasilkan pendapatan”.

Dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat belum bisa memberikan dampak perubahan yang positif pada perbaikan ekonomi keluarga masyarakat desa. Oleh sebab itu, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya juga diarahkan pada peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat desa, agar mereka juga bisa berdaya untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga masing-masing.

Dari program pemberdayaan yang dikemukakan di atas, tampaknya belum menandakan program pemberdayaan yang diimpikan oleh masyarakat. Pemerintah desa hendaknya jangan memandang masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan semata, belum sebagai subyek yang ikut menentukan program pembangunan yang mereka inginkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah desa semakin besar. Pemerintah desa berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi terbelenggu dalam berinovasi.

Apapun bentuk pemberdayaan yang dilakukan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah, maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik kegiatan pemberdayaan itu. Suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri, yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.

Pengetahuan tentang konsep pemberdayaan juga harus dipahami dengan benar oleh masyarakat, agar masyarakat mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya dan memiliki daya saing untuk menghadapi pangsa pasar. Pemberdayaan masyarakat yang baik akan menghasilkan masyarakat yang mandiri, bebas dari ketergantungan dan keterbelakangan, dan mampu menjadi kekuatan ekonomi di desanya.

2. Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat adalah satu program terobosan yang dapat dijabarkan melalui berbagai rancangan program peningkatan hidup masyarakat. Peran sentral pemerintah sangat diperlukan dan mutlak harus ada, karena pemerintah memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam

mewujudkan. Tetapi juga kompetensi masyarakat juga harus disadari oleh setiap masyarakat itu sendiri guna mempermudah pelaksanaan pemberdayaan dilapangan. Diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan tentang konsep pemberdayaan dan memiliki pemikiran yang matang untuk mengembangkan usaha, serta memiliki daya saing (Igirisa et al., 2020; Implementasi et al., 2010; Suharto, 2018; Tamireja Rusito, 2018).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat, ia tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi adalah untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Warga masyarakat dipandang bukan sistem klien yang bermasalah, melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Hal ini terkait masih belum fokusnya penerapan pemberdayaan masyarakat yang memusatkan perhatian pendekatan partisipatif serta membangun hubungan yang setara antara masyarakat dengan penyelenggara program.

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemukakan sebagai isu sentral pembangunan merupakan reaksi atau kenyataan munculnya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di pedesaan, kawasan terpencil dan terkebelakang. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan atau dikenal dengan konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Dalam (Putradi, 2018; Rahmat Agus Triharto Mokodompit; Marten Nusi; Swastiani Dunggio, 2022; Thalib et al., 2023) yang perlu ditekankan tidak hanya pada penguatan individual tetapi juga pada kelompok.

Pemberdayaan masyarakat, partisipasi menjadi salah satu bagian penting dalam pencapaian tujuan pengembangan masyarakat. Penerapan pemberdayaan masyarakat yang memusatkan perhatian pendekatan partisipatif serta membangun hubungan yang setara antara masyarakat dengan penyelenggara program.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa sukses. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil kegiatan pemberdayaan secara optimal, karena kegiatan pemberdayaan tersebut hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Sejalan dengan pengertian pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan harus mencakup dua kegiatan utama, yaitu :

- a. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
- b. Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan jejaring kelembagaan. Kapasitas adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan peran masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu yang pasif, melainkan merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya. Karena itu fungsi-fungsi individu dalam organisasi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan.

Kepala Desa (pemerintah desa) mempunyai kemampuan untuk menggerakkan keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Desa et al., n.d.; Syaifudin & Ma'ruf, 2022; Ulumiyah, 2019). Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Kerjasama ini menuntun hubungan yang setara antara rakyat dan pemerintah, oleh karena itu rakyat diupayakan memiliki kapasitas baik secara individual maupun kelembagaan. Kapasitas individual dan kelembagaan inilah yang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penempatan masyarakat sebagai subyek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulaidari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan merupakan bentuk peran serta yang harus dilembagakan dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) perlu untuk menggali potensi

peran serta masyarakat dalam pembangunan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Karena dalam era pembangunan desa yang semakin maju, peran serta masyarakat diharapkan dapat terwujud bukan hanya dalam format kerja bakti dan donasi, tetapi masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pemberdayaan, sehingga program yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik. Peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan ini adalah bentuk peran serta yang harus dilembagakan dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat (Ahmad et al., 2022; Damanik, 2019; Desa et al., n.d.; Ma'ruf, P., Sakir, M., & Bau, 2021; Nua, 2022; Rahmat Agus Triharto Mokodompit; Marten Nusi; Swastiani Dunggio, 2022; Ulumiyah, 2019).

IV. KESIMPULAN

Simpulan dari artikel ini adalah sebagai berikut: 1). Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Ollot I belum begitu maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, masih banyak kelemahannya. Di lihat dari peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, Kepala Desa masih belum dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mengerakkan seluruh komponen, terutama tokoh masyarakat untuk ikut dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa sebagai langkah awal untuk menampung aspirasi masyarakat dalam rangka membuat kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian peran pemerintah desa sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat, masih kurang maksimal untuk menghidupkan peran kepala dusun dan tokoh masyarakat dalam menjaring aspirasi warga untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk dibawa pada musyawarah pembangunan desa. Adapun peran pemerintah desa sebagai pembina juga harus lebih diefektifkan lagi, karena keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masih rendah, masyarakat hanya mau mengikuti pelaksanaan program pemberdayaan kalau pelaksanaan di lakukan di dusunnya saja, kalau di dusun lain mereka tidak mau ikut ambil bagian di dalamnya; 2). Program pemberdayaan masyarakat di Desa Ollot I lebih condong pada pembentukan sikap masyarakat terhadap program pemberdayaan, seperti kunjungan ke dasa wisma, dan ke masjid-masjid atau apabila ada kegiatan-kegiatan hajatan masyarakat. Di samping itu, pemerintah desa Ollot I juga melakukan kegiatan pembinaan karang taruna atau kepemudaan, pembinaan dalam bidang keagamaan bekerja sama dengan para tokoh agama, dan pembinaan dalam bidang keamanan untuk menjaga keamanan desa. Saran yang diberikan adalah: 1). Pemerintah Desa Ollot I harus lebih mengintensifkan lagi koordinasinya dengan lembaga pemberdayaan masyarakat setempat, terutama dalam mengorganisir kerjasama dengan kepala dusun dan tokoh masyarakat, agar dapat menjadi

perpanjangan Kepala Desa dalam menginformasikan program-program pemberdayaan dan sekaligus menanamkan rasa kebersamaan antara sesama warga desa, agar dalam pelaksanaan program pemberdayaan mendapat dukungan sepenuhnya dari semua warga masyarakat; 2) Pemerintah Desa Ollot I hendaknya lebih mengarahkan program pemberdayaan masyarakat pada kegiatan yang lebih mengarah pada peningkatan keterampilan masyarakatnya, agar mereka dapat lebih mandiri dengan membuka usaha kecil untuk menambah tingkat perekonomian keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., Arman, & Dunggio, S. (2022). Peran Dinas Pariwisata Kota Gorontalo Dalam pengembangan Pariwisata Dimasa Pandemi Covid-19. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 41–56.
- Ali, M., Amil, A., & Zulhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2), 6–12. <https://doi.org/10.31764/jua.v22i1.579>
- Damanik, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(2), 171–186. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i2.1346>
- Desa, M., Ulumiyah, I., Juli, A., Gani, A., & Mindarti, L. I. (n.d.). *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti*. 1(5), 890–899.
- Dumbi, R., Arman, A., & Dunggio, S. (2022). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Bulila Kabupaten Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 01(02), 92–102. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/view/271%0Ahttps://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/download/271/79>
- Igirisa, I., Tohopi, R., Tui, F. P., & Abdussamad, J. (2020). Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Penanggulangan Risiko Bencana Di Desa Balayo Dan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(1), 61–72. <https://doi.org/10.37606/publik.v6i1.25>
- Implementasi, E., Pemberdayaan, K., & Bantul, D. I. K. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Pada Sektor Pariwisata*. IX(2), 1272–1287.
- Ma'ruf, P. ., Sakir, M., & Bau, H. (2021). Birokrasi Pelayanan Publik di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Public. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 34–49.

- Nua, S. P. (2022). Peran Dan Fungsi Bahasa Daerah Pada Komunikasi Masyarakat Di Kelurahan Dembe 2 Kota Gorontalo Role and Function of Regional Language in Community Communication in Dembe Village 2 Gorontalo City komunikasi adalah komunikasi sosial , yang II , pengamatan me. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 77–87.
- Podungge, A. W., Podungge, A. M., & Mahfudin, A. (2023). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Di Kabupaten Gorontalo. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 12–26.
- Putradi, L. A. (2018). *Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2015 Program Studi Ilmu Pemerintahan*. 1–16.
- Rahmat Agus Triharto Mokodompit; Marten Nusi; Swastiani Dunggio. (2022). Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Kotamobagu. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18–29.
<https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/view/37%0Ahttps://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/download/37/14>
- Riduwan. (2018). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018a). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Suharto. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). *Senas POLHI*, 1, 19.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380.
<https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Tamireja Rusito. (2018). Pemberdayaan masyarakat dan desa di kabupaten lebak provinsi banten. *Jurnal Ilmiah Niagara*, X(1), 1–22.
- Thalib, H., Nusi, M., & Razak, D. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo Community Participation in Recess for DPRD Members from the Gorontalo City National Mandate Party Fraction besar pada segala bentuk kehidupan berbangsa. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 02(01), 19–32.

- Ulumiyah, I. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 890–899.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance. Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikiya.